

2018



PROFIL KEMISKINAN

Kota Semarang



**Badan Pusat Statistik
Kota Semarang**

2018



<https://semarang.go.id>

PROFIL KEMISKINAN

Kota Semarang

PROFIL KEMISKINAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

No. Publikasi : 33740.2010
Katalog : 3205005.3374
Ukuran Buku : 15 x 21 cm
Jumlah Halaman : iv + 39 halaman

Naskah :
M Yamani, S.Si
Fungsional Statistisi Muda BPS Kota Semarang

Gambar :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Edisi Cetakan :
Tahun 2020

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah. Sampai saat ini data yang berkaitan dengan kemiskinan belum tersedia secara komprehensif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah menyediakan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Publikasi Profil Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2018 merupakan salah satu publikasi kemiskinan yang berisi jumlah dan persentase penduduk miskin serta profil kemiskinan yang meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, fasilitas perumahan dan pengeluaran rumah tangga miskin.

Kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Semarang , Juni 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Semarang,



Fachruddin Tri Ubajani S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	<u>hal</u>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
1. Pendahuluan	1-4
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sistematika Penulisan	4
2. Metode Penghitungan Kemiskinan	5-19
2.1. Konsep Kemiskinan	5
2.2. Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan....	6
2.3. Pendekatan Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi	7
2.4. Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga	15
3. Kemiskinan Kota Semarang	20-37
3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	20
3.2. Profil Penduduk Miskin Kota Semarang	23
4. Penutup	36-38

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin ...	20
Tabel 3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan	21
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	24
Tabel 3.4. Angka Melek Huruf dan Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin	25
Tabel 3.5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 ke Atas Menurut Status Pekerjaan	28
Tabel 3.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja	30
Tabel 3.7. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Bersih	31

Tabel 3.8.	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Perkapita	32
Tabel 3.9.	Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Tingkat Kemiskinan	34
Tabel 3.10.	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aspek penekanan pembangunan saat ini selain pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, masalah kemiskinan dan pemerataan pembangunan juga menjadi isu nasional yang cukup hangat. Analisis mengenai dua hal terakhir tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Masalah kemiskinan dan pemerataan menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk ditelaah sampai seberapa jauh dampaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan mencari atau mengamati kantong-kantong kemiskinan harus dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dapat terwujud.

Pemerintah memang telah mengantisipasi masalah kemiskinan, utamanya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai program gerakan pengentasan kemiskinan. Program tersebut dijabarkan melalui beberapa program antara lain program beras untuk keluarga miskin, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan program-program pengembangan usaha kecil

yang mandiri melalui PNPM Mandiri. Program-program tersebut bertujuan antara lain penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, pengembangan sistem jaringan sosial serta pengembangan budaya usaha miskin. Meskipun banyak program yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai.

Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Pengukuran kemiskinan yang sebenarnya dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut diartikan sebagai kemiskinan karena seseorang tidak mampu memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sementara kemiskinan relatif berhubungan dengan konsep atau posisi seseorang dibandingkan dengan orang lain atau antar kurun waktu-waktu. Faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan antara lain adalah pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, inflasi, pajak dan subsidi atau bahkan politik.

Ukuran kemiskinan yang diungkapkan oleh beberapa peneliti masing-masing mempunyai keterbatasan. Ukuran ekuivalen konsumsi beras yang digunakan Sayogyo (1977) sangat

dipengaruhi oleh harga dan kualitas beras disatu sisi harga beras cukup terkendali sebab berpengaruh besar pada tingkat inflasi, sehingga gerak harga beras kurang mencerminkan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Karena harga beras saat ini masih dikendalikan pemerintah. Dipihak lain, beragamnya kualitas beras dan tidak samanya harga beras antar daerah juga berpengaruh pada ukuran besarnya batas pengeluaran minimum yang menggunakan harga beras rata-rata.

Ukuran kemiskinan yang diungkapkan oleh BPS adalah pemenuhan kebutuhan minimal 2100 kalori untuk setiap orang. Ukuran BPS ini cukup realistis karena memperhitungkan kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, dimana untuk kebutuhan bukan makanan biasanya disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat yang selalu berubah karena perkembangan jaman dan perkembangan pendapatan masyarakat.

1.2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran kemiskinan di Kota Semarang. Publikasi ini menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin dan profil kemiskinan di Kota Semarang yang

meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan pengeluaran rumah tangga miskin, selama kurun waktu 2014 – 2018. Series data dari publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi kemiskinan di Kota Semarang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana program pembangunan di Kota Semarang diharapkan dapat menyusun program yang mampu menjembatani masalah kemiskinan penduduk.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Profil Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang penulisan, tujuan dan sistematika penulisan

Bab II Metode Penghitungan Kemiskinan, menguraikan tentang konsep definisi dan penghitungan penduduk miskin

Bab III Kemiskinan di Kota Semarang, berisi uraian tentang jumlah dan persentase penduduk miskin serta profil kemiskinan di Kota Semarang yang meliputi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan pengeluaran rumah tangga miskin

Bab IV Penutup berisi tentang beberapa kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II Metode Pengukuran Kemiskinan

2.1 Konsep Kemiskinan

Seperti diketahui, pengertian kemiskinan sering menjadi topik perdebatan diantara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor, dan peneliti lokal sering sekali mempunyai perspektif dan pengertian yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Kendati demikian, pada umumnya sepakat terhadap keterbatasan dari pendekatan pengukuran yang ada sekarang ini, yaitu penghitungan jumlah penduduk miskin oleh BPS dan sistem pendataan keluarga miskin oleh BKKBN pada dasarnya dirancang, dianalisa dan digunakan secara sentralistik. Sampai saat ini pendekatan pemantauan kemiskinan yang mengkaitkan kemiskinan dengan organisasi sosial setempat masih kurang diperhatikan. Secara umum metode pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan tiga pendekatan, yaitu berdasarkan: 1) garis kemiskinan pendapatan (*income-based poverty line*), 2) garis kemiskinan konsumsi (*consumption-based poverty line*), dan 3) karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin. Ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut.

2.2. Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan

Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan (*income based poverty line*). Mereka yang dinyatakan berada dalam kemiskinan adalah individu, rumah tangga, masyarakat atau kelompok sosial yang memperoleh pendapatan standar minimal. Salah satu contoh penggunaan konsep ini adalah penetapan batas \$1 per kapita per hari sebagai indikator kemiskinan dalam *Goal 1: Millenium Development Goal* (United Nations, 2000).

Kelemahan Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan

Pendekatan ini mengandung beberapa kelemahan, seperti: 1) pendekatan ini menyamaratakan daya beli masyarakat untuk setiap wilayah, padahal tingkat harga barang dan jasa antar negara dan antar daerah cukup berbeda, terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan dan antara daerah terpencil dan tidak terpencil; 2) pendapatan disini mengandung konsep statis, dimana orang yang berpendapatan dibawah \$1 dikategorikan miskin, padahal orang tersebut bisa saja mengkonsumsi lebih dari \$1 per hari melalui kredit atau pinjaman yang akan dilunasi dimasa yang akan datang,

3) pendapatan biasanya cenderung dilaporkan lebih rendah dalam survei, karena lupa, enggan, dan sulit diamati (terutama usaha pertanian).

2.3. Pendekatan Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi

Pendekatan ini adalah pendekatan yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam menghitung penduduk miskin di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang/rumah tangga. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung “garis kemiskinan konsumsi” dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada

sedikit diatas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

Batas kecukupan konsumsi makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Wydia Pangan dan Gizi (1978). Sejak tahun 1993 penghitungan kecukupan kalori didasarkan pada 52 komoditi makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi, hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) tahun 1993 dan 1996. Paket komoditi makanan setelah 1996 dievaluais perkembangannya untuk tahun-tahun setelah 1996.

Batas kecukupan konsumsi non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum non-makanan, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar non-makanan lainnya. Pemilihan jenis konsumsi non-makanan mengalami perkembangan dari satu periode ke periode lainnya. Pada periode sebelum tahun 1993, jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri dari 14 jenis untuk perkotaan dan 12 jenis untuk pedesaan; sedangkan pada periode sejak tahun 1996 (Hasil

SPKKD, 1996), jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri dari 51 jenis untuk perkotaan dan 47 jenis untuk perdesaan.

Secara rinci, prosedur estimasi penduduk miskin untuk tingkat propinsi dan nasional dapat dilihat pada publikasi “Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS”. Hasil penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin per propinsi dan nasional dari tahun 1999-2002 dapat dilihat pada publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, Buku 1: Propinsi (BPS, 2002a).

Sejak tahun 2002, yaitu setelah berlakunya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka disamping penghitungan penduduk miskin untuk tingkat nasional dan propinsi, BPS juga telah melakukan penghitungan penduduk miskin untuk tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data kor (pengeluaran rumah tangga per kelompok konsumsi) hasil Susenas. Hasil penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota berikut Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari data kor Susenas telah dipergunakan dalam penghitungan DAU sejak tahun anggaran 2002. Metode dan hasil penghitungan penduduk miskin tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 2: Kabupaten/Kota (BPS, 2002b) .

Pengukuran Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, Foster, Greer, dan Thorbecke (1984) merumuskan suatu ukuran seperti berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{y_i} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

α = 0,1,2

Z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

Q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

N = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0) yaitu persentase penduduk miskin, sedangkan jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), dan $\alpha=2$ diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks*).

Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P_1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan/ *Poverty Gaps Index* (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan demikian indeks ini merupakan indikator yang baik tentang kedalaman kemiskinan. Melalui indeks kedalaman kemiskinan juga akan dapat diperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Ukuran ini masih belum realistis karena belum mempertimbangkan biaya operasional dan faktor penghambat. Sungguhpun demikian, ukuran tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan. Sebagai ukuran pengentasan kemiskinan, indeks ini cukup memadai karena transfer dana kemiskinan dilakukan dengan target sasaran yang sempurna. Namun indeks ini masih memiliki

kelemahan karena mengabaikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan/ *Poverty Severity Index* (P_2)

Untuk memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin digunakan ukuran *Poverty Severity Index* (P_2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang di mana penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dalam penghitungannya, indeks ini dapat diperoleh melalui rumus FGT dengan nilai $\alpha=2$. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jatuh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Keterbatasan Pendekatan Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi

Perlu diketahui bahwa pendekatan BPS dalam pengukuran kemiskinan memang telah mengikuti ketentuan-ketentuan pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara luas di negara lain, tetapi hanya berdasarkan pendekatan ekonomi, yaitu konsep daya beli melalui pengeluaran/konsumsi rumah tangga dalam rupiah, yang

tidak sepenuhnya demikian untuk daerah kabupaten. Disamping itu, penghitungan kemiskinan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali melalui Susenas modul konsumsi, hanya dimaksudkan untuk menghasilkan jumlah penduduk miskin agregat pada tingkat nasional dan propinsi. Walaupun BPS, dengan menggunakan data kor Susenas (berdasarkan data pengeluaran rumah tangga per kelompok konsumsi) telah melakukan penghitungan penduduk miskin untuk kabupaten/kota, tetapi penghitungan tersebut masih dalam konstruksi garis kemiskinan yang dikaitkan dengan pola konsumsi penduduk miskin propinsi yang didasarkan pada subsample Susenas yang lebih kecil (modul konsumsi) yang hanya mewakili tingkat propinsi. Budaya lokal dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya hanya secara tidak langsung dalam pendekatan ini melalui preferensi konsumsi yang diaggregasi untuk tingkat propinsi. Faktor komposisi rumah tangga hanya disesuaikan menurut jumlah anggota rumah tangga, padahal anggota rumah tangga dari masing-masing rumah tangga terpilih biasanya berbeda menurut umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

Permasalahan lain dari pengukuran kemiskinan dengan pendekatan *basic needs* ini adalah bahwa pengukuran tersebut adalah pengukuran makro, yaitu ukuran estimasi berdasarkan

sampel rumahtanga. Pengukuran tersebut pada dasarnya bisa digunakan untuk alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tetapi tidak bisa digunakan secara operasional untuk mengidentifikasi rumah tanga penduduk miskin di lapangan. Disamping itu, asumsi rumah tanga pada Susenas juga mengikuti model rumah tanga/keluarga inti (*nuclear family*) sebagai pengambil keputusan dalam transaksi ekonomi. (sama seperti konsep keluarga sejahtera BKKBN). Kedua hal ini belum tentu sesuai di daerah lain, karena tidak sensitif dengan transfer dalam bentuk benda diluar pasar formal, pertukaran-pertukaran diantara individu yang saling tergantung, keluarga inti dan keluarga yang lebih luas, hubungan keluarga secara individu dan kelompok keluarga yang cukup banyak.

2.4. Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga/Keluarga

2.4.1. Pendataan Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Pendekatan BKKBN dalam pengukuran kemiskinan didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam 5 (lima) tahapan, yaitu “keluarga prasejahtera”, “ keluarga sejahtera tahap I”, “keluarga sejahtera tahap II”, “keluarga sejahtera tahap III”, dan “keluarga sejahtera tahap III plus”. Keluarga miskin adalah keluarga-

keluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus) adalah “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I”. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi lima indikator berikut:

- a. anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing;
- b. seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih;
- c. seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian;
- d. bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; dan
- e. bila anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) ingin mengikuti keluarga berencana (KB) pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

“Keluarga prasejahtera” adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut.

Konsep “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I” tersebut sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil atau keluarga inti (*nuclear family*). Oleh karena ukuran kemiskinan oleh BKKBN tidak begitu akurat untuk konteks daerah yang masih menganut sistim kekerabatan keluarga.

Indikator-indikator BKKBN yang mengobservasi karakteristik sosial ekonomi, seperti frekwensi makan anggota keluarga dalam sehari, pemilikan pakaian yang berbeda-beda tersedia untuk individu dalam setiap kegiatan yang berbeda (dirumah, bekerja, sekolah, dan bepergian), kondisi lantai rumah (tanah, kayu, semen), perilaku keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan bahkan perilaku anggota keluarga melaksanakan aktifitas keagamaan sebagai pre-kondisi dari keinginan untuk memberikan harta seseorang untuk yang memerlukan semuanya didasarkan norma keluarga kecil (*nuclear family*) dan sejahtera tanpa memperhatikan tekanan untuk saling membantu diantara jaringan keturunan dan tetangga.

Jumlah keluarga Pra KS dan KS-1 tahun 1999 menurut propinsi dan perbandingannya dengan jumlah rumah tanga miskin berdasarkan garis kemiskinan konsumsi dari hasil Susenas1999 disajikan pada Lampiran 2: Dari Lampiran 2 tersebut terlihat bahwa hasil penghitungan BKKBN jauh lebih besar daripada hasil perhitungan BPS.

2.4.2. Pendataan Karakteristik Rumah tanga Miskin Hasil Susenas

Pada tahun 2000 BPS juga telah melakukan studi penentuan kriteria penduduk miskin di beberapa propinsi, yang bertujuan untuk mencari variabel-variabel yang dapat dipakai untuk merumuskan suatu kriteria yang dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi penduduk/rumah tanga miskin. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka akan dapat diidentifikasi rumah tanga-rumah tanga yang terkategori miskin.

Berdasarkan studi tersebut diperoleh delapan variabel yang layak dan operasional untuk diterapkan di lapangan (BPS, 2000), yaitu: luas lantai perkapita (lebih kecil atau lebih besar dari 8 m²), jenis lantai (tanah atau bukan tanah), ketersediaan air bersih (tidak terlindung atau terlindung), keberadaan jamban tidak ada atau ada, kepemilikan asset (tidak punya atau punya), variasi konsumsi lauk pauk (tidak bervariasi dan bervariasi), pembelian pakaian (minimal membeli satu stel pakaian atau tidak), kehadiran dalam kegiatan sosial (ya atau tidak). Kedelapan variabel tersebut telah mencakup aspek sosial dan ekonomi penduduk/rumah tanga diantaranya aspek sandang, pangan, perumahan, kepemilikan asset dan aktivitas sosial. Pada tahun 2002, kedelapan variabel-variabel

tersebut telah ditambahkan pada Susenas Kor, dimana variabel-variabel yang mengacu pada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan yang mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakmiskinan dimana skor 1 dan skor 0. Dengan demikian akan diperoleh skor maksimum 8 untuk yang paling miskin dan skor minimum yaitu 0 untuk yang paling tidak miskin. Berdasarkan hasil studi tahun 2000 ditetapkan bahwa skor batas untuk rumah tangga miskin adalah 5, artinya rumah tangga yang mempunyai skor 5 atau lebih akan dikategorikan miskin.

Dengan demikian akan diperoleh skor maksimum 8 untuk yang paling miskin dan skor minimum yaitu 0 untuk yang paling tidak miskin. Berdasarkan hasil studi tahun 2000 ditetapkan bahwa skor batas untuk rumah tangga miskin adalah 5, artinya rumah tangga yang mempunyai skor 5 atau lebih akan dikategorikan miskin.

Perbandingan Rumah tangga/Penduduk Miskin hasil Pendekatan Delapan Karakteristik Rumah tangga Miskin dan Pendekatan Konsumsi pada tahun 2002 dapat dilihat pada Lampiran 3. Dari hasil tersebut tampak bahwa kriteria delapan variabel tersebut tidak bisa diterapkan untuk semua daerah, karena hasilnya sangat berbeda dengan pendekatan garis kemiskinan konsumsi. Dengan menggunakan skor 5 atau lebih sebagai ukuran

rumah tanga miskin, terlihat bahwa ukuran tersebut hanya cocok untuk Provinsi DKI Jakarta. Ini mengindikasikan bahwa pengukuran kemiskinan berdasarkan karakteristik rumah tanga miskin seharusnya tidak dilakukan secara seragam dan sentralistik, tetapi harus spesifik lokal dan dirancang oleh daerah dengan memperhatikan dinamika sosial setempat.

BAB III Kemiskinan di Kota Semarang

3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Dari ukuran di atas untuk perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Semarang kurun waktu 2014 – 2018 telah menunjukkan penurunan dari 84,7 ribu jiwa menjadi hanya 73,6 ribu jiwa pada tahun 2018. Jika dilihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang, jelas terlihat penurunannya, penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 5,04 persen turun secara signifikan menjadi hanya 4,14 persen pada tahun 2018. Penduduk miskin pada tahun 2018 menurun menjadi 73,6 ribu jiwa atau dengan persentase penduduk miskinnya sebanyak 4,14 persen.

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kota Semarang Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2014	84,7	5,04
2015	84,3	4,97
2016	83,6	4,85
2017	80,9	4,62
2018	73,6	4,14

Sumber: BPS RI

Garis Kemiskinan (GK) merupakan jumlah nilai pengeluaran minimum makanan maupun non makanan yang merupakan batas pengeluaran seseorang dianggap sebagai penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

Tahun	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	0,47	0,08	348.824
2015	0,50	0,09	368.477
2016	0,76	0,18	382.160
2017	0,54	0,12	402.297
2018	0,58	0,15	427.511

Sumber: BPS RI

Garis kemiskinan Kota Semarang terus mengalami kenaikan. Dari 348.824 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2014 menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dari 402.297 rupiah/kapita/bulan menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan atau naik sekitar 6,27 persen. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan 3,71 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* P1) mengalami fluktuasi. Nilai indeks P1 tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,76, hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan pada tahun 2016 lebih jauh dibanding tahun-tahun yang lain.

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks*-P2), menunjukkan fluktuasi. Nilai Indeks P2 tertinggi terjadi pada tahun 2016, hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun yang lain.

3.2. Profil Penduduk Miskin Kota Semarang

3.2.1. Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya ini berangkat dari kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Untuk memperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Tahun	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA +
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	25,47	47,60	16,93
2015	22,73	41,06	36,21
2016	22,71	47,81	29,48
2017	17,71	50,55	31,74
2018	25,62	40,71	33,68

Sumber: BPS RI

Salah satu karakteristik demografis yang berpengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya persentase penduduk miskin yang pendidikannya tamat SD/SLTP.

Bahkan masih tercatat penduduk miskin yang pendidikannya tidak tamat SD.

Tabel 3.4. Angka Melek Huruf dan Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Di Kota Semarang

Tahun	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-24 Tahun	15-55 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	100,00	99,59	100,00	100,00
2015	100,00	98,56	100,00	97,92
2016	100,00	98,04	100,00	94,11
2017	100,00	99,42	100,00	79,64
2018	100,00	97,85	100,00	76,77

Sumber: BPS RI

Pada tahun 2014, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin di Kota Semarang untuk kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 100,00 persen. Sedangkan untuk kelompok usia 15-55 tahun hanya sebesar 99,59 persen.

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi sekolah (APS). APS penduduk miskin pada kelompok usia 7 – 12 tahun sudah relatif tinggi yaitu sudah mencapai 100 persen. Sedangkan APS penduduk miskin kelompok usia 13 – 15 tahun cenderung lebih rendah jika dibandingkan kelompok usia 7 – 12 tahun.

3.2.2. Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan di bidang ekonomi adalah perluasan dan pemerataan penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan kerja yang semakin luas dan merata diharapkan dapat terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga bisa mendekati kondisi pasar tenaga kerja yang ideal (*full employment*). Dengan proses tersebut yang terjaga keberlanjutannya, taraf hidup masyarakat selanjutnya dapat meningkat secara luas.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah belum terciptanya keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Dari sisi permintaan, penyerapan tenaga kerja masih belum optimal akibat adanya kendala struktur produksi yang relatif *rigid* terhadap

tenaga kerja dan minimnya penciptaan lapangan kerja yang baru. Sedangkan dari sisi penyediaan, *supply* tenaga kerja terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang memasuki usia kerja. Dampak yang timbul dari ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply* ini adalah munculnya pengangguran.

Pengangguran selalu menjadi momok yang menakutkan dari eksekusi sebuah proses pembangunan. Tidak tertanganinya masalah ini dengan baik, bisa dipastikan akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial lain yang lebih besar, mulai dari kesenjangan, kecemburuan sosial, sampai pada kerawanan sosial. Mengingat pentingnya masalah ini, ketenagakerjaan selalu menjadi isu sentral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh setiap pemerintahan di seluruh dunia.

Bagi Kota Semarang, ketenagakerjaan menjadi masalah sangat penting untuk ditangani dengan baik. Hal ini terkait dengan fenomena yang cukup ironis bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak diiringi dengan semakin meratanya distribusi pendapatan dan banyaknya nilai tambah dari hasil pembangunan yang diyakini mengalir ke luar daerah. Kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik (dari segi pemerataan dan jumlah penyerapan,

maupun tingkat upah dan iklim kerja yang kondusif) diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar dari ironi tersebut.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Miskin Usia + 15 th ke Atas Menurut Status Pekerjaan

Tahun	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	41,01	8,19	50,79
2015	32,70	3,30	64,01
2016	42,10	4,44	53,46
2017	43,45	1,39	55,16
2018	41,60	15,55	42,85

Sumber: BPS RI

Sektor informal terkait dengan bentuk kegiatan usaha berskala kecil dilihat dari modal yang digunakan dan jumlah pekerja yang terlibat. Kegiatan jualan bakso keliling, jualan "jajanan" di pinggir jalan, jualan sayur-keliling, jualan rokok di lampu merah, merupakan contoh-contoh khas kegiatan usaha informal. Bentuk kegiatan itu jelas "mudah di masuki" (*easy entry*) tetapi juga mudah untuk keluar (ganti pekerjaan).

Sebagian besar penduduk miskin di Kota Semarang bekerja di sektor formal, namun jumlahnya cenderung menurun. Penduduk miskin yang bekerja di sektor informal pada periode 2014 – 2018 persentasenya tidak lebih dari 30 persen. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal pada tahun 2018 tercatat sebesar 15,55 persen, lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 1,39 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal pada tahun 2018 mencapai 42,85 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 55,16 persen. Dalam kurun waktu 2017 – 2018, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja di Kota Semarang pada tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 41,60 persen.

Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,83 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,39 persen. Sedangkan penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 56,57 persen. Persentase penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor

pertanian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2015. Hal ini menggambarkan penduduk miskin di Kota Semarang berbeda dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, dimana penduduk miskin justru didominasi oleh mereka yang bekerja bukan di sektor pertanian.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Miskin Usia + 15 th ke Atas Menurut Sektor Bekerja

Tahun	Tidak bekerja	Bekerja Di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	41,01	8,19	50,79
2015	32,70	3,30	64,01
2016	42,10	4,44	53,46
2017	43,45	1,39	55,16
2018	41,60	1,83	56,57

Sumber: BPS RI

3.2.3. Fasilitas Perumahan

Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan

kenyamanan seluruh anggota rumah tangga yang menempatinnya. Beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat antara lain ketersediaan air bersih, jamban dan luas lantai.

Tabel 3.7. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama

Tahun	Air Layak	Jamban Sendiri
(1)	(2)	(3)
2014	84,82	90,55
2015	94,16	92,21
2016	98,62	97,95
2017	93,79	95,07
2018	94,30	93,96

Sumber : BPS RI

Kesadaran penduduk miskin untuk menggunakan jamban sendiri relatif besar. Hal ini terlihat dari persentase penggunaan air layak dan jamban sendiri/bersama oleh penduduk miskin selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari 80 persen. Pada tahun

2015, persentase penduduk miskin yang menggunakan air layak tercatat sebesar 94,16 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 84,82 persen. Persentase pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sendiri pada tahun 2014 tercatat sebanyak 90,55 persen dan meningkat hingga tahun 2018 menjadi 93,96 persen.

Luas lantai merupakan salah satu ukuran kenyamanan seluruh anggota rumah tangga yang menempatinnya. Pada tahun 2014, sebagian penduduk miskin di Kota Semarang telah menempati luas lantai kurang dari atau sama dengan 8 meter persegi per kapita. Namun pada tahun 2017 sebagian besar telah menempati luas lantai lebih dari 15 meter persegi per kapita.

Tabel 3.8. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai Perkapita

Tahun	≤ 8 meter persegi	8 < Luas ≤ 15	> 15 meter persegi
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	41,55	31,32	27,13
2015	22,77	26,48	50,75
2016	31,63	38,12	30,25
2017	18,64	35,91	45,46

Sumber: BPS RI

3.2.4. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan cermin tingkat pendapatannya per kapita sebulan. Kebutuhan makanan memang merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar.

Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.

Pola konsumsi makanan penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Misalnya masyarakat di daerah pegunungan cenderung lebih banyak mengkonsumsi sayuran dibandingkan masyarakat pantai yang umumnya mengkonsumsi ikan.

Masih besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi perekonomian kita

yang masih rendah mengakibatkan pendapatan penduduk yang rendah dan melonjaknya harga kebutuhan hidup.

Tabel 3.9. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Tingkat Kemiskinan

Tahun	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	57,98	47,71	48,23
2015	44,75	56,91	49,24
2016	57,54	45,43	46,02
2017	60,41	45,88	46,55
2018	63,19	45,77	46,49

Sumber: BPS RI

Pada tahun 2014, sebesar 57,98 persen pengeluaran penduduk miskin di Kota Semarang digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 42,02 persen dikeluarkan untuk kebutuhan bukan/non makanan. Sedangkan pada tahun 2018 justru meningkat, pengeluaran penduduk miskin untuk kebutuhan makanan tercatat sebesar 63,19 persen.

3.2.5. Program Pemerintah

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya atau langkah konsolidasi paket bantuan program untuk penduduk miskin dan hampir miskin.

Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang pernah membeli beras Raskin sebanyak 40,22 persen, dengan rata-rata jumlah Raskin yang dibeli sebanyak 5,57 kilogram dan rata-rata harga sebesar 2.186 rupiah.

Tabel 3.11. Persentase Rumah tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga

Tahun	Rumah tangga Penerima Raskin	Rata-rata Jumlah Raskin	Rata-rata Harga Raskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	68,97	6,23	2.115
2017	40,22	5,57	2.186

Sumber: BPS RI

BAB IV PENUTUP

- Tingkat kemiskinan di Kota Semarang kurun waktu 2014 – 2017 telah menunjukkan penurunan dari 84,7 ribu jiwa menjadi hanya 73,6 ribu jiwa pada tahun 2018. Jika dilihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang, jelas terlihat penurunannya, penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 5,04 persen turun secara signifikan menjadi hanya 4,14 persen pada tahun 2018. Penduduk miskin pada tahun 2018 menurun menjadi 73,6 ribu jiwa atau dengan persentase penduduk miskinnya sebanyak 4,14 persen. Garis kemiskinan Kota Semarang terus mengalami kenaikan. Dari 348.824 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2014 menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dari 402.297 rupiah/kapita/bulan menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan atau naik sekitar 6,27 persen. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan 3,71 persen.
- Penduduk miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya persentase penduduk miskin yang pendidikannya tidak tamat SD,

dimana pada tahun 2018 tercatat 25,62 persen penduduk miskin yang pendidikannya tidak tamat SD.

- Berbeda dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lain, sebagian besar penduduk miskin di Kota Semarang bekerja di sektor formal dan bukan sektor pertanian. Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal pada tahun 2018 tercatat sebesar 42,85 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin yang bekerja di bukan sektor pertanian pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,57.
- Kesadaran penduduk miskin untuk menggunakan jamban sendiri relatif besar. Hal ini terlihat dari persentase penggunaan air layak dan jamban sendiri/bersama oleh penduduk miskin selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari 80 persen. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin yang menggunakan air layak tercatat sebesar 94,16 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 84,82 persen. Persentase pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sendiri pada tahun 2014 tercatat sebanyak 90,55 persen dan meningkat hingga tahun 2018 menjadi 93,96 persen.

- Pengeluaran penduduk miskin untuk kebutuhan makanan masih cukup tinggi yaitu di atas 50 persen. Pada tahun 2018, sebesar 63,19 persen pengeluaran penduduk miskin di Kota Semarang digunakan untuk kebutuhan makanan.
- Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang pernah membeli beras Raskin sebanyak 40,22 persen, dengan rata-rata jumlah Raskin yang dibeli sebanyak 5,57 kilogram dan rata-rata harga sebesar 2.186 rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2017*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Sayogya. 1977. *Golongan Miskin dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Desa* . Bogor : Prisma.
- Widya Karya Nasional Pangan. 1978. *Angka Kecukupan Gizi Bagi Orang Indonesia*. Jakarta : LIPI.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA SEMARANG

Jalan Inspeksi no. 1 Semarang Telp/fax (024) 3546413

email : bps3374@bps.go.id

Website: <http://semarangkota.bps.go.id>